

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Peran strategis lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam aktivitas perekonomian sekarang ini. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara kelompok masyarakat yang mempunyai dana lebih dengan kelompok yang membutuhkan dana. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.

Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank termasuk dalam perusahaan industri jasa karena aktivitas operasionalnya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Bank secara umum dapat diidentifikasi sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan atau pihak lainnya kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh laba serta menyediakan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, salah satunya adalah pengalihan aset (*asset transmutation*). Bank akan memberikan pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui bersama. Dana yang dipinjamkan berasal dari pihak yang mempunyai kelebihan dana. Pada prinsipnya bank menjadi pengalih aset dari unit surplus (*lenders*) kepada unit defisit (*borrowers*). Dalam hal ini BNI sebagai lembaga keuangan berbentuk bank, melaksanakan kegiatan di bidang perkreditan.

Menurut UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 ayat 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kegiatan menyalurkan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank umum, likuiditas keuangan, solvabilitas, dan profitabilitas sangat dipengaruhi kemampuan dan keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan. Karena adanya resiko yang melekat dalam penyaluran dana kepada pihak yang meminjam, maka bank diharapkan selalu menerapkan prinsip kehati – hatian dalam pengelolaan kredit, serta melakukan pengawasan yang secara umum disebut sebagai pengendalian internal.

Salah satu tujuan BNI sebagai bank umum melaksanakan kegiatan perkreditan adalah untuk memaksimalkan pendapatan yang di peroleh dari bunga pinjaman, menjaga aktiva yang di kuasainya, dan juga ingin mendapatkan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Untuk menjaga mutu kredit yang disalurkan dan untuk mencapai tujuan di atas, BNI perlu untuk merancang suatu sistem secara professional dan tertulis, yang dijadikan pedoman dalam praktek penyaluran kredit. Sistem ini didasarkan pada praktek kehati – hatian dan memenuhi prosedur pengawasan internal. Beberapa hal ini perlu diperhatikan dalam membuat kebijaksanaan kredit :

1. Pengembangan penyaluran kredit secara sehat
2. Tujuan yang ingin dicapai
3. Organisasi penyaluran kredit
4. Kriteria evaluasi kelayakan permintaan kredit
5. Prosedur persetujuan pemberian kredit
6. Pengawasan dan supervisi kredit
7. Penanganan kredit bermasalah
8. Peningkatan mutu sumber daya manusia
9. Dokumentasi dan administrasi kredit

Dalam penyaluran kredit selalu mengandung resiko adanya kredit bermasalah, dan hal ini merupakan bagian dari resiko bisnis bank umum. Oleh karena itu system pemberian kredit dibuat untuk meminimalisir dan mencegah

timbulnya kredit bermasalah. Sistem pemberian kredit yang ada juga harus memuat pedoman bagaimana menangani kasus kredit bermasalah bila hal itu terjadi juga.

BNI sudah merancang dan menjalankan sistem pemberian kredit yang diharapkan dapat mencapai tujuannya, menjaga mutu kreditnya, serta menjaga atau mengurangi resiko terjadinya kredit bermasalah. Penerapan sistem secara ketat dengan pengawasan yang baik dari awal sampai akhir proses pemberian kredit, diharapkan dapat memenuhi maksud – maksud seperti diatas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit di Bank BNI. Oleh sebab itu penulis memilih topik mengenai **“Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit di Bank BNI”**

1.2 Pokok Permasalahan

Ada beberapa permasalahan sesuai dengan uraian latar belakan masalah diatas yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu :

- 1 Apakah sistem dan prosedur pemberian kredit di BNI sudah dibuat dengan karakteristik system dan prosedur pemberian kredit yang baik, yaitu :
 - a. Apakah sistem pemberian kredit di Bank BNI sudah mencakup hal yang berkaitan dengan perkembangan kredit secara sehat ?
 - b. Apakah sistem pemberian kredit di Bank BNI sudah mencakup hal yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai ?

- c. Apakah sistem pemberian kredit di Bank BNI sudah mencakup hal yang berkaitan dengan organisasi penyaluran kredit ?
 - d. Apakah sistem pemberian kredit di Bank BNI sudah mencakup hal yang berkaitan dengan kriteria evaluasi kelayakan pemberian kredit ?
 - e. Apakah sistem pemberian kredit di Bank BNI sudah mencakup hal yang berkaitan dengan prosedur persetujuan pemberian kredit ?
 - f. Apakah sistem pemberian kredit di Bank BNI sudah mencakup hal yang berkaitan dengan pengawasan dan supervisi kredit ?
 - g. Apakah sistem pemberian kredit di Bank BNI sudah mencakup hal yang berkaitan dengan penanganan kredit bermasalah ?
 - h. Apakah sistem pemberian kredit di Bank BNI sudah mencakup hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu sumber daya manusia?
 - i. Apakah sistem pemberian kredit di Bank BNI sudah mencakup hal yang berkaitan dengan dokumentasi dan administrasi kredit ?
2. Apakah sistem dan prosedur pemberian kredit di BNI sudah dipatuhi sesuai dengan pedoman kebijakan dan prosedur kredit segmen korporasi dan menengah?

1.3 Batasan Masalah

Penulis perlu untuk membatasi masalah agar pembahasan tidak terlalu luas. Batasan masalah adalah pada :

1. Sistem dan prosedur yang dievaluasi adalah system prosedur kredit modal kerja (KMK).
2. KMK adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai aktiva lancar dan atau menggantikan hutang dagang, serta membiayai sementara kegiatan operasional rutin perusahaan baik yang bersifat langsung maupun tak langsung.
3. Yang dimaksud dengan karakteristik system dan prosedur pemberian kredit yang baik adalah :

1. Pengembangan penyaluran kredit yang sehat.

Salah satu yang termaksud implementasi penyaluran kredit yang sehat adalah penerapan prinsip kewhati-hatian dalam menyalurkan kredit. Dalam memutuskan pemberian kredit tidak hanya memikirkan jumlah bunga dan penghasilan yang akan diterima, melainkan juga perbandingan antara penghasilan itu dengan resiko kredit yang harus mereka tanggung.

2. Tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi kebijakan kredit tidak boleh menyimpang dari kebijakan perusahaan. Karena pada hakekatnya tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan kredit berfungsi

sebagai pendukung tercapainya tujuan usaha bank secara keseluruhan.

3. Organisasi penyaluran kredit

Agar dapat menjamin terselenggaranya penyaluran kredit secara sehat dan menguntungkan, kebijakan kredit wajib mengandung unsur pengendalian intern atas semua kegiatan yang bersangkutan dengan kredit, sejak tahap analisa kredit, hingga saat pelunasannya.

4. Kriteria evaluasi kelayakan permintaan kredit

Kebijakan kredit yang sehat memuat kriteria-kriteria untuk menentukan apakah permintaan kredit yang diajukan calon debitur dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan oleh bank umum dalam mengevaluasi kelayakan permintaan kredit:

- Tidak melanggar hukum atau peraturan pemerintah
- Tidak digunakan untuk spekulasi
- Tidak menyimpang dari kebijakan kredit bank kreditur
- Untuk menanganinya tidak dibutuhkan keahlian khusus

- Tidak menyimpang dari standar umum penggunaan kredit

5. Prosedur persetujuan pemberian kredit

Keputusan persetujuan pemberian kredit merupakan aktivitas bank umum yang penting artinya bagi kelangsungan operasi bisnis mereka. Maka dari itu dalam prosedur persetujuan pemberian kredit perlu dilengkapi dengan rambu-rambu penangkal kekeliruan yang dapat mencegah timbulnya kredit bermasalah dikemudian hari.

6. Pengawasan dan supervisi kredit

Ketentuan tentang pengawasan dan supervisi kredit sedapat mungkin mencangkup seluruh aspek penyaluran dan obyek pengawasan kredit, yang meliputi ruang lingkup berikut ini:

- Sinkronisasi pelaksanaan pemberian kredit dengan kebijakan kredit yang digariskan oleh bank
- Sinkronisasi pelaksanaan pemberian kredit dengan ketentuan pemerintah
- Perkembangan usaha bisnis debitur
- Perkembangan mutu kolektibilitas tiap portofolio kredit yang telah disalurkan

- Pemberian kredit kepada debitur intern dan yang mempunyai kaitan khusus dengan bank
- Penyisihan cadangan penghapusan kredit

Dalam rangka menciptakan sarana pengawasan kredit yang efektif hendaknya disusun pedoman tentang jenis data dan dokumen yang perlu dikumpulkan dalam arsip tiap portofolio kredit bagi tiap orang debitur, berikut jadwal pengadaan data dan dokumen tersebut. Selain itu frekwensi kunjungan para eksekutif yang disertai tugas pengawasan dan supervisi kredit kepada debitur dalam masa tertentu wajib dicantumkan dalam kebijakan kredit, termasuk didalamnya ketentuan untuk kewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kredit kepada Dewan Direksi.

7. Penanganan kredit bermasalah

Setiap bank umum wajib berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah, dan mengeliminir kerugian bank apabila kasus seperti itu muncul. Oleh karena kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari dalam setiap kebijakan kredit wajib dicantumkan pedoman bagaimana menangani kasus kredit bermasalah, apabila akhirnya kasus seperti itu muncul juga.

8. Peningkatan mutu sumber daya manusia

Tinggi rendahnya resiko kredit yang dihadapi bank banyak dipengaruhi oleh mutu eksekutif dan staf perkreditan yang mereka miliki. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusia eksekutif dan staf perkreditan baik yang baru maupun yang lama.

9. Dokumentasi dan administrasi kredit

Dokumentasi dan administrasi kredit yang akurat, segar, dan tertib merupakan bahan masukan penting bagi upaya pengawasan dan supervisi kredit, penanganan kasus kredit bermasalah dan perlindungan kepentingan bank. Tata cara pengadministrasian bank harus menjamin adanya pengendalian intern bank.

Adapun hal-hal yang bersangkutan dengan administrasi kredit yang perlu dicantumkan dalam kebijakan kredit adalah :

- Penetapan pejabat atau bagian yang bertanggung jawab untuk mengadministrasi kredit
- Jenis dokumen yang wajib diadministrasikan

- Pedoman menyusun administrasi dan statistik penyaluran kredit

4. Data yang akan dianalisis adalah data yang berkaitan dengan pemberian kredit pada tahun anggaran 2004 - 2005.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi apakah sistem dan prosedur pemberian kredit di BNI sudah dibuat dengan karakteristik sistem dan prosedur pemberiaan kredit yang baik yaitu :
 - a. pengembangan penyaluran kredit secara sehat
 - b. Tujuan yang ingin dicapai
 - c. Organisasi penyaluran kredit
 - d. Kriteria evaluasi kelayakan permintaan kredit
 - e. Prosedur persetujuan pemberian kredit
 - f. Pengawasan dan supervisi kredit
 - g. Penanganan kredit bermasalah
 - h. Peningkatan mutu sumber daya manusia
 - i. Dokumentasi dan administrasi kredit
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan sistem dan prosedur pemberian kredit di BNI sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat berguna :

1. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan dalam pemberian kredit di masa yang akan datang.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi apabila pembaca ingin melakukan penelitian.

1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan dikembangkan dengan metodologi sebagai berikut :

1. Obyek penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kasus di BNI cabang Kota, Jakarta.

2. Jenis data

- a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan belum diolah.

- b.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan langsung bisa dimanfaatkan.

3. Pengumpulan data

Data yang diperlukan untuk penelitian diperoleh dengan cara :

a. Studi lapangan

Untuk memperoleh data primer, penulis melakukan cara-cara yang bisa digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang struktur pengendalian internal maupun pelaksanaannya.

Cara-cara tersebut adalah :

- a. Wawancara, dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan data yang diperlukan kepada pejabat yang berwenang. Pertanyaan dapat diajukan secara lisan ataupun dengan menggunakan bantuan kuesioner.
- b. Observasi, dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi dan diharapkan dapat mengetahui proses pemberian kredit dari tahap awal permohonan kredit sampai tahap pelunasan kredit secara langsung.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari catatan dan dokumen –dokumen yang berkaitan dengan proses pemberian kredit.

4. Data-data yang diperlukan dalam penulisan ini :

- a. Gambaran umum perusahaan, yang meliputi sejarah berdirinya, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan.
- b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan perusahaan
- c. Jenis fasilitas kredit yang disediakan dan bisa dilayani perusahaan.
- d. Sistem dan prosedur pemberian kredit modal kerja (KMK) termasuk di dalamnya *flowchart* pemberian kredit.

1.7 Analisis Data

Kemudian data-data yang sudah diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang diajukan. Analisis data akan dilakukan dengan cara :

1. Untuk menjawab pokok permasalahan yang pertama yaitu berkaitan dengan sistem dan prosedur pemberian kredit di BNI sudah sesuai dengan karakteristik sistem dan prosedur pemberian kredit yang baik, maka akan dilakukan dengan cara membandingkan antara sistem dan prosedur pemberian kredit di BNI sudah sesuai dengan karakteristik sistem dan prosedur pemberian kredit yang baik, yaitu :

- a. Pengembangan penyaluran kredit secara sehat
- b. Tujuan yang ingin dicapai
- c. Organisasi penyaluran kredit
- d. Kriteria evaluasi kelayakan permintaan kredit
- e. Prosedur persetujuan pemberian kredit
- f. Pengawasan dan supervisi kredit
- g. Penanganan kredit bermasalah
- h. Peningkatan mutu sumber daya manusia
- i. Dokumentasi dan administrasi kredit

2. Untuk menjawab pokok permasalahan kedua yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit di Bank BNI apakah telah sesuai dengan prosedur yang ada apa tidak dilakukan dengan menbandingkan kenyataan yang ada dengan prosedur yang berlaku. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan statistical sampling, yaitu fixed sample size. Tujuan dari attribute sampling adalah mengevaluasi keefektifan rancangan dan kepatuhan. Attribute sampling dalam pengujian ini hanya digunakan apabila ada alur bukti dokumen dalam sistem dan prosedur.

1.8 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dibagi dalam 5 bab, masing-masing bab diuraikan secara garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk memilih topik tersebut. Disamping itu pula dijelaskan perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi mengenai dasar-dasar teoritis berupa konsep-konsep dasar serta pengertian-pengertian lain yang erat hubungannya dengan sistem dan prosedur pemberian kredit yang sesuai dengan materi penulisan skripsi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang akan menguraikan tentang : sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan bidang serta bentuk usaha kegiatan perusahaan, jenis kredit yang diberikan, tanggung jawab pejabat kredit, prosedur pemberian kredit, dan kolektibilitas kredit.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang sistem dan prosedur pemberian kredit di PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)

Tbk, terkait tentang evaluasi atas sistem dan prosedur pemberian kredit di PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran yang dibuat berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya dan mencoba memberikan saran-saran perbaikan yang berguna bagi perusahaan.

